

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, KEMISKINAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI KOTA PEKANBARU ALIEF FAHREZI HANIF¹, ANDO FAHDA AULIA, SE, ME, MBA (IB), PHD²

Alief Farizie Hanief¹, Ando Fahda Aulia²

[¹, ando.aulia@lecturer.unri.ac.id²](mailto:hanifalief2@gmail.com)

Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia di Kota Pekanbaru dari tahun 2003 hingga 2022, serta mengevaluasi dampak upah minimum, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Selama bertahun-tahun, upah minimum provinsi secara konsisten meningkat, sementara tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekanbaru menunjukkan fluktuasi. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa upah minimum provinsi, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekanbaru. Namun, hasil uji parsial menunjukkan bahwa upah minimum dan indeks pembangunan manusia memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kota tersebut.

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia.

Abstract

This study seeks to examine the trends in labor force participation rate, minimum wage, poverty rate, and human development index in Pekanbaru City from 2003 to 2022, and to assess the impact of the minimum wage, poverty rate, and human development index on the labor force participation rate using multiple linear regression analysis. The research employs a quantitative approach, utilizing secondary data. Over the years, the provincial minimum wage has consistently increased, while the poverty rate, human development index, and labor force participation rate in Pekanbaru City have shown fluctuations. The results of the simultaneous tests reveal that the provincial minimum wage, poverty rate, and human development index collectively influence the labor force participation rate in Pekanbaru City. However, partial test results indicate that the minimum wage and human development index have a negative and significant impact on the labor force participation rate in the city.

Keywords: Labor Force Participation Rate, Provincial Minimum Wage, Poverty And Human Development Index.

PENDAHULUAN

Fenomena sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, yang disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang terbatas dan banyaknya jumlah penduduk, bukan lagi fenomena sosial yang asing atau langka. Hampir setiap tahun, masalah ini dialami oleh banyak orang di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi masalah ini. Modal yang terbatas membuat lapangan kerja sempit. Pengangguran adalah salah satu masalah yang selalu dihadapi negara dan sulit dihindari. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, bekerja kurang dari waktu yang mereka tetapkan, atau sedang mencari pekerjaan (Muhdar & Nurjannah, 2025)

¹ Jurusan Ilmu Ekonomi, FEB Universitas Riau

² Jurusan Ilmu Ekonomi, FEB Universitas Riau

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat signifikan. Partisipasi masyarakat tidak hanya berarti memberikan kontribusi secara fisik atau finansial, tetapi juga berarti memberikan ide, pikiran, dan aspirasi yang relevan untuk keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah, bersama dengan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang ada, harus dapat mengidentifikasi potensi sumber daya yang dibutuhkan untuk merancang dan mengembangkan perekonomian daerah (Nainahas et al., 2025)

Penyelesaian masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari isu-isu lain seperti pengangguran, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya saling terkait. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil harus bersifat lintas sektor dan terkoordinasi. Terdapat lima karakteristik yang umum ditemukan pada penduduk miskin: 1) Tidak memiliki faktor produksi, 2) Tidak memiliki akses untuk memperoleh aset produksi, 3) Tingkat pendidikan yang rendah, 4) Kurangnya fasilitas, dan 5) Banyak di antara mereka yang berusia muda dan tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai (Albab et al., 2025).

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah yang berlaku hanya di sebuah kabupaten/kota. Upah adalah pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental sebagai imbalan dari para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu yang didalamnya berupa perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak termasuk tunjangan bagi pekerja, dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. (Berlian & Maria, 2023). Upah minimum regional yang didapatkan oleh buruh harus bisa mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga dari masing-masing pekerja (Arisandi & Bendesa, 2023).

Tahun	Upah Minimum Kota (Rp)	Tingkat Kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2013	1.400.000	3.27	78.16	62.01
2014	1.700.000	3.17	78.42	61.30
2015	1.878.000	3.27	79.32	63.04
2016	2.095.000	3.07	79.69	63.04
2017	2.266.722	3.05	80.01	64.22
2018	2.464.154	2.85	80.66	65.66
2019	2.662.025	2.52	81.35	65.86
2020	2.888.563	2.62	81.32	65.22
2021	2.888.563	2.83	81.58	61.61
2022	2.938.564	6.84	82.06	61.78

Selama satu dekade terakhir, Upah Minimum Kota (UMK) telah menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, yang mencerminkan peningkatan upah minimum. Dimulai dari Rp 1.400.000 pada tahun 2013, upah minimum meningkat secara signifikan menjadi Rp 2.938.564 pada tahun 2022. Lonjakan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2017, yaitu dari Rp 2.266.722 menjadi Rp 2.660.425 pada tahun 2019, diikuti dengan kenaikan lagi menjadi Rp 2.885.632 pada tahun 2020 dan 2021, dan akhirnya mencapai Rp 2.938.564 pada tahun 2022. Kenaikan yang stabil ini menunjukkan upaya untuk menyesuaikan upah dengan inflasi dan meningkatkan standar hidup, meskipun kenaikan tajam di tahun 2022 bisa jadi merupakan respons terhadap tekanan ekonomi seperti inflasi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau Indeks Pembangunan Manusia, juga telah meningkat selama 10 tahun terakhir, yang mengindikasikan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dimulai dari 78,16 pada tahun 2013, IPM terus meningkat, mencapai 82,06 pada tahun 2022. Peningkatan bertahap ini menandakan peningkatan dalam faktor-faktor seperti pendidikan, harapan hidup, dan pendapatan. Pertumbuhan paling signifikan terjadi antara tahun 2019 dan 2022, di mana indeks naik dari 81,35 menjadi 82,06. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini telah membuat kemajuan dalam pembangunan manusia, meskipun laju peningkatannya sedikit melambat di tahun-tahun berikutnya.

Tingkat Kemiskinan mengalami beberapa fluktuasi selama periode ini. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan berada di angka 3,27%, yang sedikit menurun menjadi 2,52% pada tahun 2019, yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam pengentasan kemiskinan. Namun, pada tahun 2020, tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 2,62%. Hal yang paling signifikan terjadi pada tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode analisis deskriptif untuk melihat dan menganalisis perkembangan yang terjadi, serta metode analisis kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap keterkaitan variabel, dengan data yang digunakan adalah data sekunder (time series) selama 19 tahun, yaitu dari 2003 hingga 2022. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel independen adalah Upah Minimum, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel dependen adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekanbaru menggunakan regresi linier berganda, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta^0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Nilai tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam fungsi persamaan sebagai berikut:

$$TPAK = \beta^0 + \beta_1 UMP1 + \beta_2 TKM2 + \beta_3 IPM3 + e$$

Dimana:

Y = Tingkat partisipasi angkatan kerja

β^0 = Konstanta persamaan regresi

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variable

X1 = Upah minimum provinsi

X2 = Tingkat kemiskinan

X3 = Indeks pembangunan manusia

e = Standar error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Perkembangan Upah Minimum Provinsi

Kebijakan Upah Minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: per01 / Men / 1999 tentang upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah jumlah yang tidak seimbang yang diterima pekerja secara teratur dan berkala, yang tidak terkait dengan kehadiran atau pencapaian potensi tertentu, serta Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Artinya, semua pekerja, baik yang tetap maupun tidak tetap, serta yang masih dalam masa percobaan, harus dibayar dengan layak berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR). Untuk menjaga stabilitas ekonomi, tingkat upah biasanya memiliki standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penetapan upah setiap tahun dilakukan melalui proses yang panjang. Dewan Upah Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, pekerja, dan pengusaha mengadakan pertemuan untuk membentuk tim survei yang langsung turun ke lapangan untuk mengetahui harga sejumlah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh karyawan, pekerja, dan buruh. Survei dilakukan di beberapa kota di dalam provinsi yang dianggap representatif. Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan Upah Minimum Regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan melalui mekanisme dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi sehingga setiap provinsi memiliki jumlah Upah Minimum Provinsi yang berbeda.

b) Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekanbaru

Hasil regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Jumlah Penduduk, Upah Minimum Provinsi, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian diperoleh dari analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan aplikasi EViews 12 berdasarkan data yang diperoleh selama 19 tahun penelitian. Untuk mengurangi variasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai variabel dependen dilambangkan dengan TPAK, sedangkan Upah Minimum (UMP), Tingkat Kemiskinan (TKM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel independen. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dilakukan estimasi sebagai berikut:

Hasil Regresi		
Variable	Unstandardized B	Sig.
UMP1	0,380962UMP	.658
TKM2	-0,537342	.462
IPM	1,766466	.6348
Cosntant	-67,64784	.807

Dimana persamaannya adalah:

$$\text{TPAK} = \beta^0 + \beta_1\text{UMP1} + \beta_2\text{TKM2} + \beta_3\text{IPM3} + e$$

Dari hasil analisis yang digunakan dalam regresi linier berganda, hasilnya ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = -67,64784 + -0,380962\text{UMP} + -0,537342\text{TKM} + 1,766466\text{IPM}$$

Dalam hasil persamaan regresi, variabel X1 memiliki koefisien negatif sebesar -0.380962. Hal ini berarti korelasi antara UMP dan TPAK bersifat negatif, di mana peningkatan 1 variabel UMP akan diikuti oleh penurunan tingkat TPAK. Variabel X2 memiliki koefisien negatif sebesar -0.537342. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara kemiskinan dan tingkat partisipasi angkatan kerja bersifat negatif, di mana peningkatan 1 unit variabel kemiskinan akan diikuti oleh penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja. R-squared menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y adalah 6%, sedangkan 94% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

1. Uji F (simultan)

Uji ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel dependen secara keseluruhan atau bersama-sama (simultan) terhadap variabel independen. Berdasarkan output di atas, nilai F-Statistik adalah 0.222160 dengan Prob (F-statistic) sebesar 0.878623 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekanbaru.

2. Uji T

Analisis T-test atau yang dikenal sebagai uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen. Berdasarkan output di atas, nilai perhitungan masing-masing variabel independen, yaitu upah minimum, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia, diperoleh terhadap variabel dependen tingkat partisipasi angkatan kerja.

1. Berdasarkan output, diketahui bahwa nilai probabilitas upah minimum adalah 0.6580, yang ketika dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5%, nilai probabilitas upah minimum lebih besar dari tingkat kesalahan (0.6580 > 0.05), artinya upah minimum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekanbaru.
2. Berdasarkan hasil output, diketahui bahwa nilai probabilitas kemiskinan adalah 0,4616, yang ketika dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5%, kemiskinan lebih

besar dari tingkat kesalahan ($0,4616 > 0,05$), yang berarti kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Pekanbaru.

3. Berdasarkan gambar, nilai probabilitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 0,6348. Ketika dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5%, nilai IPM lebih besar dari tingkat kesalahan ($0,6348 > 0,05$), yang berarti IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Pekanbaru.

Uji Asumsi Klasik

Tes Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp.Sig (2-tailed)	.200

Menurut Basuki & Prawoto (2016), uji normalitas berguna untuk menentukan apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau berasal dari populasi berdistribusi normal. Mengingat nilai tersebut tergantung pada beberapa variabel, masing-masing dengan pengaruh positif atau negatif yang relatif kecil, maka distribusi normal berfungsi sebagai model yang cukup baik dan kontinu (Ghozali, 2021). Berdasarkan hasil output di atas, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari alpha atau ($0,200 > 0,05$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Test Multikolinearitas

Collinearity Tolerance	VIF
.037	.2725
.831	1.203
.128	7.806

Analisis multikolinearitas yang menggunakan Model Inflasi Varians (VIF) menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinearitas di antara variabel-variabel independen. Nilai masing-masing variabel, yaitu Upah Minimum Kota (2,724), Tingkat Kemiskinan (1,203), dan Indeks Pembangunan Manusia (7.806), semuanya di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian bebas dari indikasi multikolinearitas.

Test Aukorelasi dan R Square

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier model regresi linear ada hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya (Ghozali, 2021:162). Metode uji Durbin-Watson dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu data menunjukkan adanya indikasi adanya autokorelasi. Ghozali (2021) memberikan kriteria untuk menginterpretasikan nilai Durbin-Watson:

Null Hypothesis	Decision	Criteria
There is no positive autocorrelation	Reject	$0 < d < dl$
There is no negative autocorrelation	No Decision	$dl \leq d \leq dU$
There is no negative correlation	Reject	$4 - dl < d < 4$
There is no negative correlation	No Decision	$4 - dU \leq d \leq 4 - dl$
There is no autocorrelation, Positive or negative	Not rejected	$dU < d < 4 - dU$

Setelah diperoleh nilai dari uji Durbin-Watson, maka nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai pada tabel Durbin-Watson. Nilai yang diperoleh harus berada pada kisaran $1,9005 < DW < 2,0995$, dibandingkan dengan angka-angka dari tabel Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut kondisi:

Adjusted R Square	Durbin-Watson
.439	1.555

Tabel di atas menampilkan nilai Durbin-Watson yang diperoleh dari uji tersebut sebesar 1.555. Ketika membandingkan hasil ini dengan rentang yang ditentukan dalam tabel Durbin-Watson, yaitu $1.5005 < DW < 1.6995$, terlihat jelas bahwa angka ini memenuhi

kriteria yang tercantum dalam tabel. Sedangkan nilai R^2 sendiri sebesar 49% berarti dari semua variable dari penelitian ini berpengaruh sebesar 49%.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan hasil uji regresi parsial (t-test), variabel Upah Minimum memiliki nilai probabilitas $0.6580 > \alpha (0.05)$, sehingga H_0 diterima. Hal ini berarti Upah Minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pekanbaru. Dan diketahui bahwa nilai koefisien adalah -0.380962 , dalam hal ini berarti variabel Upah Minimum memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan negatif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pekanbaru. Hal ini berarti korelasi antara upah minimum dan tingkat partisipasi angkatan kerja bersifat negatif, di mana peningkatan 1 unit variabel upah minimum akan diikuti oleh penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja dan sebaliknya.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan hasil uji regresi parsial (t-test), variabel kemiskinan memiliki nilai probabilitas $0.4616 > \alpha (0.05)$, sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti kemiskinan parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Pekanbaru. Dan diketahui bahwa nilai koefisien adalah -0.537342 , dalam hal ini berarti variabel Kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Pekanbaru. Pengaruh negatif berarti bahwa jika kemiskinan meningkat sebesar satu persen, maka nilai tingkat partisipasi angkatan kerja di Pekanbaru akan berkurang sebesar $-0,537342$ persen, dan sebaliknya jika kemiskinan berkurang sebesar satu persen, maka nilai tingkat partisipasi angkatan kerja di Pekanbaru akan meningkat sebesar $0,537342$ persen.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan hasil uji regresi parsial (uji t), diketahui bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai t sebesar $0,6348 > \alpha (0,05)$, sehingga H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial, nilai Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Pekanbaru. Diketahui bahwa nilai koefisien adalah 1.766466 , yang berarti bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pekanbaru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upah minimum provinsi, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia secara negatif mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekanbaru. Hal ini karena tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam studi ini. Tidak semua pekerja di Kota Pekanbaru memiliki standar gaji yang sesuai dengan UMP, banyak standar lain dalam menentukan upah, salah satunya adalah UMR. Kemiskinan tidak mempengaruhi TPAK karena banyak orang miskin tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja yang dihitung dalam TPAK dan rendahnya tingkat Pendidikan IPM mempengaruhi TPAK karena kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh IPM. Semakin tinggi nilai IPM, semakin tinggi kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, sehingga nilai TPAK meningkat

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, W. R., Rahim, M., Nusantara, A. W., Oleo, U. H., Oleo, U. H., & Oleo, U. H. (2021). PENDUDUK, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB). 09, 112–120.

- Albab, U., Ilmiah, J., Vol, M., & History, A. (2025). Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi , Upah Minimum Regional Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara Tahun 2001 – 2021. 4(5), 1333–1357.
- Arisandi, N. T., & Bendesa, I. K. G. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, Inflasi Dan Covid-19 Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Bali. JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing), 3(2), 153–164. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.8808>
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.(2023). Tingkat partisipasi angkatan kerja, dalam
- Badan Pusat Statistik pekanbaru. (2019). Indeks Pembangunan Pembangunan
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2023). Data kemiskinan 2010-2022, dalam
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2023). Upah minimal provinsi, dalam
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan EVIEWS. Rajagrafindo Persada.
- Berlian, A. R., & Maria, N. S. B. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Umk, Dan Tingkat Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi 12(4), 1–9. <https://repofeb.undip.ac.id/12605/>
- Bonerri, K. B., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. (2018). Pengaruh Pendidikan Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Di Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(01), 34–45.
- Faelassuffa Assa, & Eppy Yuliani. (2021). Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Kajian Ruang, 1(1), 49–61. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/83354044/6411-libre.pdf?1649307351=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKajian_Tingkat_Partisipasi_Angkatan_Kerj.pdf&Expires=1691681090&Signature=YdlrgYx4MkcU68rDrIBUjfoKWhW9tcCiI1vOQBv2uZXCMg6iR7zJvIG7VskIlkxkDdHZZCH5RTzm5erihO0PDpQaU-GoPIUhZf1qMcVRec0-JqbKg2fYX9-s5IMi85igb8zHSTWqyZpNBqo6ja7Qnjuq6giIJ9zE-GkpJYxtfXICRRCBlzsqQuLtdQiaY6UZ5LoyUaoXhgqWNxLVI7keRMfS8YpmrcrltwEPnGivPIg6OCBRQ6jB2liR7F1lO65aupwO6DJXTDUSFBIAbLzEhC3GLoK4ry7zaS5obV1BelV5eMRVGNin5VxI2lithTn5AcZO85tMyF7zlkp-xY1ow__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Ferezegia, D. V. (2018). Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan. Jurnal Sosial Humaniora Terapan, 4(1), 1–6. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 26. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://pekanbaru.bps.go.id> di akses akses Tanggal 12 April 2023 Pukul 12.30
- <https://pekanbaru.bps.go.id> di akses Tanggal 12 April 2023 Pukul 12.30
- <https://pekanbaru.bps.go.id> di akses Tanggal 27 Agustus 2019, Pukul 12.30
- Manusia (IPM) Pekanbaru 2010-2022, dalam <https://pekanbaru.bps.go.id> di akses
- Muda, R., Koleangan, R., & Kalangi, J. B. (2019). Pengaruh angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan pengeluaran perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi di sulawesi utara pada tahun 2003-2017. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(01), 44–55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/22368>
- Muhdar, A., & Nurjannah, S. (2025). Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Lokal Dalam Rangka Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Sorong. 4(3), 3688–3694.
- Nainahas, Y., Yohanes, S., & Tupen, R. R. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa d i Desa T ' eba dan Desa T ' eba Timur Kecamatan Biboki Tanpah , Kabupaten Timor Tengah Utara Universitas Nusa Cendana , Indonesia. tanggal 12 April 2023. Pukul 12.30
- Tolitoli, D. K., Nasir, M., Dg, H., & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Ekonomi Pembangunan , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin CitraDewiPeuru@gmail.com The Effect of Population and Unemployment on Poverty Levels in Tolitoli District Menurut Sukirno (2004: 28)

pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan , tetapi belum memperolehnya . 4(1), 19–26.

Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 96. <https://doi.org/10.22146/jgs.34054>